

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdukadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Raya, 2010).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2006).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992).
- Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).
- Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Yogyakarta, Lakaitbang, 2012).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Damanhuri H. R., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2007).
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Tarsito, 1984).
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Hilman hadikusuma, *Hukum Perkaawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adar, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Tangerang, Sinar Grafika, 2008).

- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Khomariah, *Hukum Perdata*, (Malang, UMM Press, 2004).
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Erlangga, 1999).
- M. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya, Refika Petra Media, 2016).
- M. J. Widiatmoko, et, al, *Teknik Pembuatan Akta Notaris & PPAT Pemahaman Empiris & Yuridis*, (Jakarta: Bintang Mandiri, 2019).
- Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982).
- Martiman Prodjohamidjo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishin, 2002).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2011).
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, edisi pertama, 1995).
- R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 2 (Jakarta: PT. Internusa, 1990).
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005).
- S. Wojawasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Van Hoere, Ikhtiar Baru, 1990).
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).
- Sonny Dewi Judiasih, et.al, *Perjanjian Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015*, (Bandung: Penerbit Cakra, 2018).
- Sri Mamuji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 2005)..

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan. Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta Penerbit Kencana, 2019).
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).
- Wahyono Darmabrata, *et, al, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. (Bandung, Sumur Bandung, 1981).
- _____, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung, Sumur Bandung, 1981).
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975).
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Jurnal

- Annisa Istrianty, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Privat Law*, Volume 3, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Carol Teale and Nichola Fisher, “*Marriage, Separation and Divorce and Their Effect on Family Wealth*”, P.C.B., Issue Thomson Reuters (Professional) UK Limited and contributors, 2011.
- Eva Dwinopianti, “*Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*”, *Lex Renaissance*, Volume 2 No. 1, Januari 2017.
- Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol 2, Nomor 1 Maret 2018.

I Nyoman Putu Budiarta, “Dilema Penegakkan Hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”, Jurnal Notariil, Volume 1, No.2, 2017.

Laurensiun Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2013, Manado, Universitas Sam Ratulangi.

Rebecca Glass, “Trading Up: Postnuptial agreement, Fairness, and a Principled New Suitor for California”, California Law Review, Volume 92 Issue 1, 2004.

Tengku Erwin Syahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1, Medan, 2014.

Wawan Setawan, “Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik”, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Nomor 23/pdt.sus-pkpu/2018/PN. Niaga smg.

Internet

Legal Akses, *Akta Otentik dan Surat di Bawah Tangan*, <http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1995).

Wawancara

Hasil wawancara dengan Dr. Winanto Wiryomartani, S.H., M.Kn selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, tanggal 18 November 2022.

Hasil wawancara dengan Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Subang, tanggal 18 November 2022.